

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

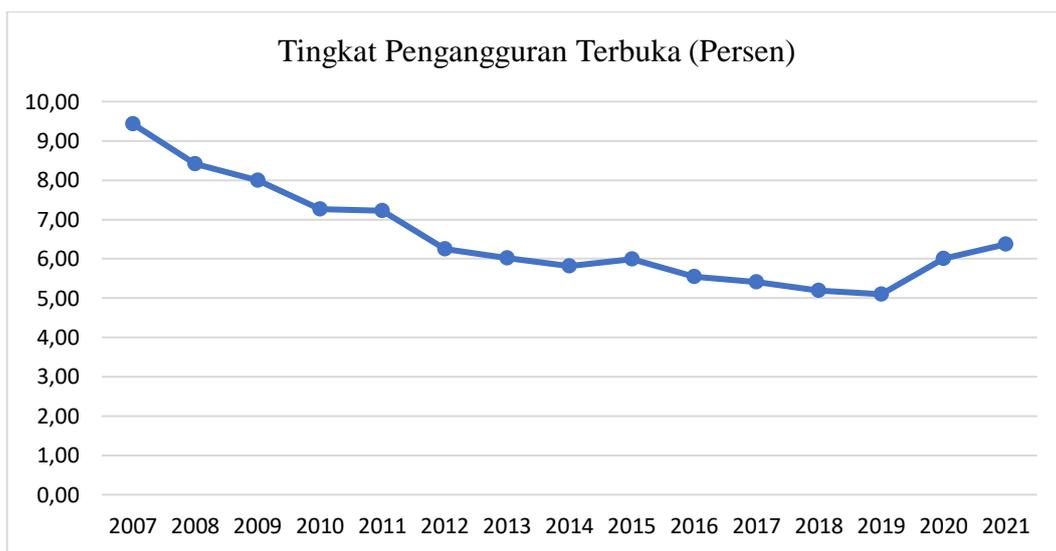
Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang banyak dan memiliki input tenaga kerja yang besar (Wulandari & Marwan, 2019). Banyaknya jumlah penduduk jika tidak bisa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan lapangan pekerjaan, maka akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial seperti pengangguran (Rubijanto, 2012). Pengangguran merupakan masalah yang umum di alami oleh negara-negara berkembang dan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dihilangkan namun bisa diminimalisir (Helvira & Rizki, 2020).

Pengangguran merupakan masalah yang paling sulit dihindari oleh pemerintah, karena pengangguran dapat menimbulkan tindakan kriminalitas dan masalah ekonomi ataupun masalah sosial lainnya. Rendahnya angka pengangguran maka kehidupan masyarakat suatu Negara akan semakin sejahtera, begitu pula sebaliknya (Lubis & Murtala, 2021). Menurut Sukirno, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, namun belum dapat memperoleh satu pekerjaan pun (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

Pengangguran pada umumnya di sebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan yang mampu menyerap angkatan kerja tersebut (Helvira & Rizki, 2020). Indikator yang dapat digunakan untuk menghitung pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka ini tercipta akibat lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja yang

tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan di dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka (Doni, dkk, 2022).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dalam runtun tahun 2007 sampai tahun 2021 menunjukkan keadaan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang mengalami fluktuasi. Data perkembangan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Sumber : BPS Indonesia, 2023

Gambar 1.1
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2007-2021

Dari gambar tersebut diketahui bahwa TPT mengalami keadaan yang dinamakan fluktuatif. Dimana tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu 2012 sampai 2014 semakin berkurang dari tahun ke tahun. Namun kembali melonjak pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2019 TPT kembali berkurang. Sampai akhirnya TPT kembali melonjak pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6,00%. Peningkatan tersebut tidak berhenti disitu, pada tahun 2021 angka tersebut kembali meningkat sebanyak 6,37%.

Masalahan pengangguran menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia, karena keberhasilan pembangunan disuatu negara dapat dilihat dengan mampu atau tidaknya menurunkan angka pengangguran dalam upaya pengurangan angka kemiskinan, Suropto dalam

(Rahmayani dan Andriyani, 2019). Menurut Prawira (2018) pengangguran merupakan salah satu permasalahan paling serius dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

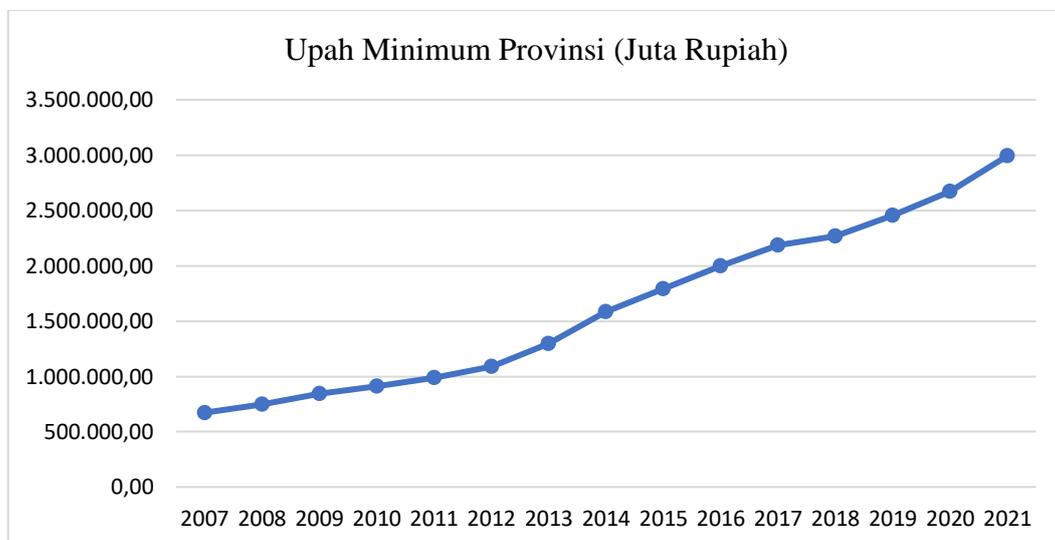
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat upah (Effendy, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah RI No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Di Indonesia, nominal pengupahan di setiap wilayah yang ditetapkan itu berbeda-beda tergantung pembangunan di masing-masing wilayah. Upah merupakan faktor utama kenapa individu ingin bekerja karena ingin mendapatkan uang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Dengan kata lain, upah merupakan salah satu faktor untuk menekan tingkat pengangguran (Permadi & Chrystanto, 2021).

Kebijakan pemerintah dalam penetapan upah pada suatu wilayah berdampak terhadap penurunan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan jika ketetapan upah minimum suatu wilayah meningkat maka akan mempengaruhi biaya produksi dan akibatnya perusahaan akan melakukan efisiensi yaitu dengan cara mengurangi tenaga kerja sehingga pengangguran akan meningkat (Hadi, dkk, 2020). Menurut Mankiw (2018) untuk menjelaskan keadaan perekonomian di suatu wilayah adalah teori kekakuan upah. Kekakuan upah (*wage rigidity*) adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sehingga penawaran kerja sama dengan permintaan. Sehingga kekakuan upah dapat menyebabkan terjadinya pengangguran.

Upah rendah yang diterima oleh masyarakat berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adanya ketentuan kenaikan nilai upah minimum, jumlahnya tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak masyarakat,

artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih berkisar di atas jumlah upah minimum (Sari, 2021).

Teori Kaufman dan Hotchkiss menyatakan, hubungan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran adalah semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan penetapan upah minimum yang tinggi mendorong perusahaan menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit. Begitupun sebaliknya, penetapan upah minimum yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran (Ziddan dan Sakti, 2022). Data rata-rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:



Sumber : BPS Indonesia, 2023

Gambar 1.2
Grafik Rata-Rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2021

Berdasarkan data diatas, upah minimum provinsi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besaran upah minimum provinsi yang terus meningkat tersebut di ikuti oleh tingkat pengangguran terbuka yang berfluktuatif. Fenomena yang terjadi sejak tahun 2012 sampai tahun 2019 adalah tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang sedangkan upah minimum provinsi meningkat. Fenomena tersebut tentunya sangat bertentangan dengan teori Kaufman dan Hotchkiss dalam (Ziddan dan Sakti, 2022). Namun fenomena tersebut didukung

oleh teori Gilarso yang menyatakan dampak positif dari penetapan upah adalah kenaikan upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah pengangguran akan menurun (Helvira & Rizki, 2020).

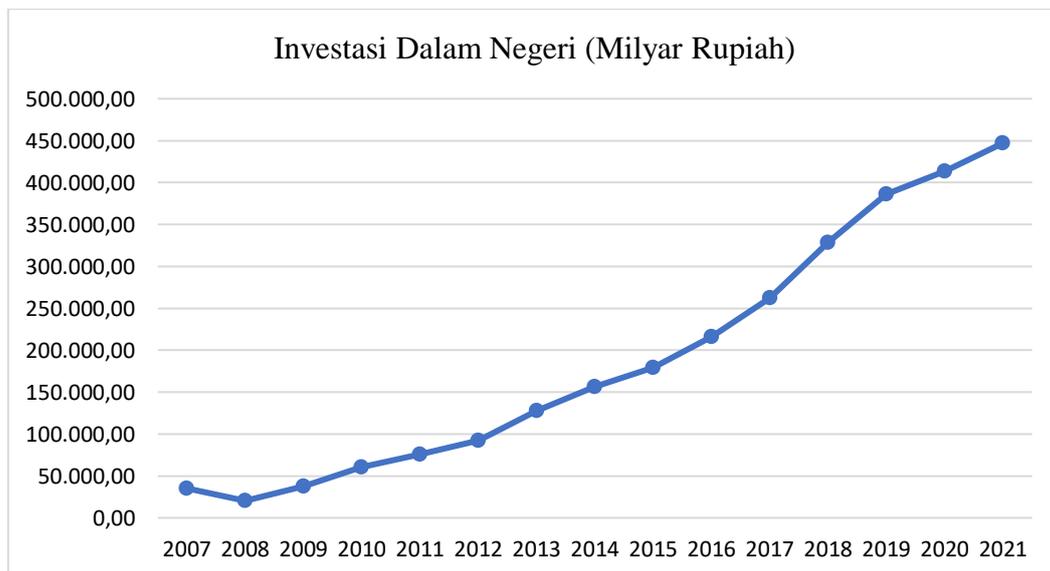
Teori tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuntiarti (2018) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka, artinya jika upah minimum naik maka akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Namun fenomena tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Padel & Suman (2017) yang menyatakan, hubungan antara kebijakan upah minimum dengan tingkat pengangguran terbuka bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa ketika upah minimum meningkat, maka jumlah pengangguran terbuka ikut meningkat.

Masalah pengangguran juga berhubungan dengan investasi, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ialah dengan mendorong tingkat investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Helvira & Rizki, 2020). Menurut Sukirno, investasi adalah pengeluaran atau penanaman modal untuk menambah barang modal dan perlengkapan produksi agar dapat meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia di suatu negara (Wulandari & Marwan, 2019).

Makmun dan Yasin menyatakan, investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi, sebab investasi dapat memicu kenaikan output, sehingga meningkatkan permintaan input, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesempatan kerja (Suwandika & Yasa, 2015). Zulhanafi, dkk menjelaskan, kegiatan penanaman modal akan lebih banyak membutuhkan input produksi seperti tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran (Helvira & Rizki, 2020). Semakin besar investasi, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi barang dan jasa.

Artinya kemungkinan pembukaan lapangan pekerjaan akan semakin besar (Wahyuni & Murtala, 2019).

Liana, dkk (2014) menjelaskan, investasi merupakan modal untuk pembangunan negara-negara berkembang, dimana investasi ini akan dapat mendorong negara-negara berkembang menjadi negara maju. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan ekonomi adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan melalui kegiatan investasi baik yang bersumber dari dalam atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut teori Harrod Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka tenaga kerja yang dibutuhkan semakin besar pula (Kurniawan. 2014). Data realisasi investasi dalam negeri di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini:



Sumber : BPS Indonesia, 2023

Gambar 1.3
Grafik Investasi Dalam Negeri di Indonesia Tahun 2007-2021

Berdasarkan data investasi dalam negeri dan tingkat penangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir, investasi dalam negeri mengalami peningkatan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mengalami keadaan fluktuatif dimana pada tahun 2020 dan tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka terus meningkat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan teori

Harrod Domar dalam (Kurniawan, 2014), namun keadaan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Ziddan dan Sakti (2022) yang menyatakan, investasi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya ketika investasi tinggi maka jumlah pengangguran juga tinggi, hal tersebut dikarenakan di beberapa daerah para investor tertarik pada sektor padat modal untuk menanamkan modal pada industri-industri yang memiliki keuntungan yang besar sehingga adanya penyerapan tenaga kerja harus memenuhi persyaratan khusus pada kesempatan kerja.

Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Ziddan dan Sakti (2022), hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) menyatakan bahwa dalam jangka panjang, variabel investasi terbukti berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka Indonesia. Di sisi lain, dalam jangka pendek pun terbukti bahwa perubahan investasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada kenaikan investasi maka tingkat pengangguran terbuka akan turun.

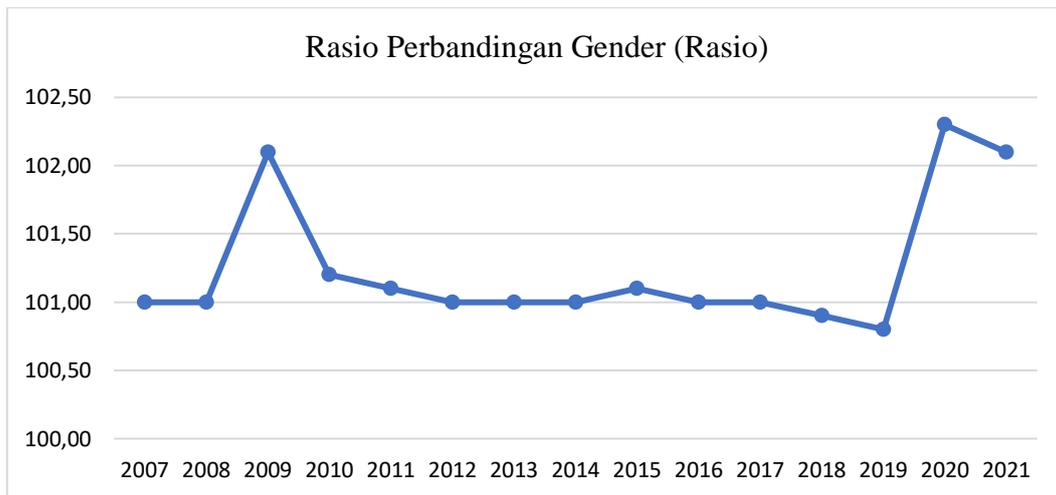
Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah faktor jenis kelamin (Burhanuddin, dkk, 2020). Rasio perbandingan gender dapat dihitung dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK). Rafik & Pahlevi (2020) menyatakan, rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Secara umum tingkat pengangguran terbuka perempuan memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka laki-laki, Masague dalam (Novianti, 2015). Tingkat pengangguran terbuka perempuan umumnya disebabkan oleh faktor sosial budaya, seperti mengurus rumah tangga, sulit untuk memasuki pasar kerja formal, terjadinya diskriminasi pekerjaan bagi perempuan, dan budaya yang memetakan peran serta kedudukan perempuan (Novianti, 2015).

Bias gender terlihat jelas dalam banyak program pengembangan usaha kecil yang cenderung lebih mengutamakan kelompok laki-laki sebagai pemilik usaha. Sebagai akibatnya, kelompok pengusaha perempuan lebih diarahkan untuk sektor-sektor yang diasumsikan sebagai sektor yang feminim. Dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti politik, ekonomi, media massa, pendidikan dan kemasyarakatan, perempuan masih tetap jauh ketinggalan dari laki-laki (Rahmani, 2021). Menurut Khairani dan Andriyani (2021), perempuan berperan penting dalam rumah tangga yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya seperti menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak-anaknya, menjaga kesehatan keluarga, serta memilih pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Berbeda dengan perempuan, laki-laki dinilai lebih berpeluang untuk masuk ke dunia kerja. Mutiadanu, dkk (2018) menjelaskan bahwa laki-laki lebih banyak memiliki kesempatan untuk bekerja karena di dukung oleh faktor fisik yang kuat dibandingkan dengan perempuan yang sedikit mobilitasnya dalam menemukan peluang kerja. Berbanding terbalik dengan laki-laki, perempuan dituntut untuk lebih banyak belajar dari pada bekerja. Teori Becker menyatakan bahwa perempuan memiliki keunggulan komparatif pada pekerjaan rumah tangga nonpasar daripada laki-laki yang memiliki keunggulan komparatif di pasar tenaga kerja. Perempuan memiliki akses yang lebih sulit untuk memasuki pasar tenaga kerja sehingga menambah angka pengangguran terbuka perempuan (Novianti, 2015).

Pada umumnya penduduk laki-laki jika dibandingkan dengan penduduk wanita, apabila komposisi penduduk wanita jauh lebih besar dibandingkan laki-laki tentunya hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk wanita maka kemungkinan untuk padatnya jumlah penduduk makin besar, karena wanita memiliki alat reproduksi yang dapat meningkatkan jumlah penduduk (Rahayu & Dewi, 2013). Artinya semakin bertambahnya jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, maka pengangguran akan ikut

bertambah. Data Rasio Perbandingan Gender di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut ini:



Sumber : BPS Indonesia, 2023

Gambar 1.4
Grafik Rasio Perbandingan Gender di Indonesia Tahun 2007-2021

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 diketahui rasio perbandingan gender mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tingkat pengangguran terbuka meningkat. Rasio perbandingan gender yang meningkat artinya jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Fenomena tersebut bertentangan dengan teori Becker dalam (Novianti, 2015) dan hasil penelitian Putra (2018) yang menyatakan bahwa rasio jenis kelamin laki-laki terhadap jenis kelamin perempuan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan maka pengangguran akan berkurang. Namun fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mutiadanu, dkk (2018) yang menyatakan, jenis kelamin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran muda di Sumatra Barat.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi sebagaimana telah di ulas di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pengangguran merupakan masalah paling serius dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, dapat menyebabkan timbulnya kesmiskinan dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Setiap negara selalu menginginkan rendahnya tingkat

pengangguran. Akan tetapi, pada kenyataannya pengangguran selalu muncul dalam perekonomian, walaupun tingkat perekonomian dalam keadaan baik (Prawira, 2018). Salah satu kegiatan untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan meningkatkan penanaman modal dalam negeri, menstabilkan tingkat upah minimum provinsi, dan melakukan pemberdayaan manusia agar tidak menimbulkan kesenjangan gender.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti tentang **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri dan Rasio Perbandingan Gender terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa Besarkah Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang?
2. Seberapa Besarkah Pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang?
3. Seberapa Besarkah Pengaruh Rasio Perbandingan Gender terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang?
4. Seberapa Besarkah Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri dan Rasio Perbandingan Gender Secara Bersama-Sama terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

2. Mengetahui Pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
3. Mengetahui Pengaruh Rasio Perbandingan Gender terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
4. Mengetahui Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri dan Rasio Perbandingan Gender Secara Bersama-Sama terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait agar dapat memperhatikan masalah pengetahuan tentang pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri dan Rasio Perbandingan Gender terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia.
2. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam mengambil keputusan ataupun strategi yang berkenaan dengan Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri dan Rasio Perbandingan Gender terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia.
3. Dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri, Rasio Perbandingan Gender dan Pengangguran Terbuka di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan pengetahuan penulisan karya ilmiah dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Tingkat Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri dan Rasio Perbandingan Gender terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.
2. Dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca agar bertambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang pengaruh Tingkat Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri dan Rasio Perbandingan Gender terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia.
3. Dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa menjadi sebagai contoh dalam pembuatan karya ilmiah serta bisa untuk memperluas ilmu pengetahuan, wawasan dan sebagai referensi dari hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.